



**Buletin**

Edisi, 297  
Juli 2019

# **Isen Mulang**

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



diterbitkan ; Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah



**Pelindung :**

Gubernur Kalimantan Tengah

**Penasehat :**

Sekretaris Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Pengarah :**

Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

**Penanggung Jawab:**

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi  
Publik Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Pemimpin Redaksi:**

Kepala Bagian Penyaringan Informasi  
dan Publikasi pada Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Sekretaris Redaksi:**

Kepala Sub Bagian Informasi  
Pemerintahan dan Umum pada Biro  
Protokol dan Penyaringan Informasi  
dan Publikasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

**Wakil Sekretaris Redaksi:**

Kepala Sub Bagian Media dan  
Dokumentasi pada Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Koordinator Distribusi :**

Kepala Sub Bagian Informasi  
Ekonomi, Pembangunan dan  
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Staf Pelaksana :**

Muliyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,  
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito  
Zuares

**Alamat Redaksi :**

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya  
Telp/Fax (0536) 4200241

**Ijin Penerbitan Khusus**

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

## Daftar Isi :

Gubernur : Kalteng Berpotensi Sebagai Penyangga  
Pangan Masa Depan \_\_\_\_\_ 3

Sekda Kalteng : PNS Harus Tanggap Merespon Aspirasi  
Masyarakat \_\_\_\_\_ 4

Sekda Kalteng : Pelaksanaan Program Pembangunan  
Harus Tepat Waktu \_\_\_\_\_ 5

Sekda Kalteng Harapkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020  
Meningkat. \_\_\_\_\_ 5

Sekda Kalteng Harapkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020  
Meningkat. \_\_\_\_\_ 6

Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara  
Persetujuan Bersama Pemprov dan DPRD Provinsi  
Kalteng \_\_\_\_\_ 6

Menko PMK RI : Harganas Harus Diimplementasi Secara  
Konkrit. \_\_\_\_\_ 7

Kalimantan Tengah Provinsi Ketiga Tuntaskan Blue Print  
PPM Tambang \_\_\_\_\_ 8

Gubernur : Pemprov Terus Atasi Masalah Pendidikan  
\_\_\_\_\_ 8

Gubernur Harapkan Program Kerja Pemuda  
Muhammadiyah Membumi & Mengakar. \_\_\_\_\_ 9

Gubernur Sugianto Sabran Tegaskan Spektrum Bela  
Negara Sangat Luas \_\_\_\_\_ 9

Ketum Dekranas Hj. Mufidah JK Resmikan Gedung  
Dekranasda Kalteng \_\_\_\_\_ 10

Gubernur Tegaskan Kalteng Butuh Kepastian dan Keadilan  
Ekonomi. \_\_\_\_\_ 11

Ketua Wantimpres : Ekonomi Berbasis Digital Kalteng Akan  
Tumbuh Baik \_\_\_\_\_ 12

Program BUN500, Mentan Amran Sulaiman : Kita Buat  
Tonggak Sejarah Dari Kalteng \_\_\_\_\_ 13

KALTENG MENUJU SMART CITY UNTUK WUJUDKAN  
SMART PROVINCE \_\_\_\_\_ 14

Gubernur Sugianto Nilai Pembangunan Pipa Gas Trans  
Kalimantan Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat  
Kalteng \_\_\_\_\_ 15

Gubernur : Manfaatkan Aset Restorasi Gambut Untuk  
Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat  
\_\_\_\_\_ 16

Wagub Kalteng Ajak ISEI Berkontribusi Dalam  
Pertumbuhan Ekonomi Kalteng \_\_\_\_\_ 17

Penduduk Miskin Di Kalteng Terus Mengalami  
Penurunan \_\_\_\_\_ 17

Gubernur Ajak Masyarakat Beralih Ke Usaha  
Budidaya \_\_\_\_\_ 18

Gubernur : Jadikan "Hari Jadi" Semangat Percepat  
Pembangunan. \_\_\_\_\_ 19

## Gubernur : Kalteng Berpotensi Sebagai Penyangga Pangan Masa Depan

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berpotensi sebagai penyangga pangan masa depan karena memiliki hamparan lahan yang luas. Selain itu, Kalteng juga memiliki potensi perikanan dan kelautan serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir terus mampu mempertahankan ketersediaan beras. Tahun 2018 produksi padi Kalteng 754.834 ton gabah kering giling atau masih surplus 121.128 ton. Demikian juga komoditas jagung 2018 mencapai 107.858 ton pipilan kering, meningkat dibanding 2017 yang hanya mencapai 51.080 ton pipilan kering, sedangkan komoditas bawang merah 695 ton, cabe 4.687 ton dan populasi sapi mencapai 85.958 ekor.

“Oleh karena itu pada moment Pekan Daerah KTNA Ke-12 Tingkat Provinsi Kalteng 2019 ini, Saya berharap agar KTNA Provinsi Kalteng dapat berperan sebagai garda terdepan dalam memajukan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Namun kita menyadari untuk melaksanakan pengembangan dalam skala yang luas masih ada kendala dengan status lahan dan terbatasnya sumber daya manusia sebagai pengelola”, ungkap Sugianto Sabran ketika membuka Pekan Daerah Ke-12 Kontak Tani Nelayan Andalan Tingkat Provinsi Kalteng 2019 di Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin (8/7/2019).

Keberadaan KTNA sebagai mitra pemerintah daerah diharapkan menjadi pelopor, mampu memperjuangkan kemajuan dan meningkatkan motivasi petani-nelayan, menumbuhkan minat generasi muda pada bidang pertanian dan perikanan serta mampu melahirkan solusi bagi petani-nelayan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif. “Saya berharap PEDTA KTNA Ke-12 ini dapat dimanfaatkan sebagai media konsolidasi, komunikasi dan tukar informasi antar petani-nelayan, petani-nelayan dengan pengusaha dan petani-nelayan dengan pemerintah”, ujar Sugianto.

Pemerintah Provinsi Kalteng bersama masyarakat harus benar-benar mempersiapkan diri, apalagi di tengah gencarnya rencana pemerintah pusat memindahkan Ibukota Pemerintahan RI. “Persiapan dari segi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mutlak dilakukan menghadapi kemungkinan

Kalteng terpilih menjadi Ibukota Pemerintahan yang baru”, tegas Sugianto Sabran.

Sementara itu Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir saat menghadiri Pekan Daerah KTNA Ke-12 Tingkat Provinsi kalteng di Desa Eka Bahurui Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut mengemukakan beberapa hal yang membuat produk pertanian Indonesia kalah dengan produk luar negeri. “Ada 2 Pos yang kita selalu kalah dengan produk luar negeri yaitu tenaga kerja dan sewa lahan. Itulah yang membuat harga komoditas kita mahal”, ungkap Winarno Tohir.

Namun Winarno Tohir optimis biaya produksi per-kilonya tidak kalah dengan negara lain setelah Kementerian Pertanian memberikan program bantuan mesin-mesin pertanian meliputi mesin pengolah lahan, mesin panen, mesin pengering dan penggilingan sebanyak 180.000 unit.

Pada Pekan Daerah Ke-12 KTNA Tingkat Provinsi Kalteng 2019 ini Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran mendapat Penghargaan Satya Lencana Adhi Bakti Tani Utama, sedangkan Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dan Bupati Katingan Sakariyas mendapat Satya Lencana Adhi Bakti Tani Nelayan Pratama dari Kelompok Tani – Nelayan Andalan yang diserahkan oleh Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir.

Pekan Daerah Ke-12 KTNA Tingkat Provinsi Kalteng 2019 yang diikuti 700 kelompok tani dan nelayan se-Kalteng tersebut juga digelar pameran hasil produksi pertanian dan perikanan Kalimantan Tengah serta panen raya jagung.\*\*\*





## Sekda Kalteng : PNS Harus Tanggap Merespon Aspirasi Masyarakat

Palangka Raya – Biro PKP. 320 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan II se-Kalimantan Tengah berhasil lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah selama 51 hari kerja mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 31 Juli 2019.

Pelatihan Dasar selama 51 hari kerja itu meliputi materi pembelajaran Non Klasikal atau Aktualisasi di tempat kerja. “Kita bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena peserta Latsar CPNS Golongan III dan Golongan II Angkatan Ke II Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 telah berhasil menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang wajib mereka selesaikan” ujar PIH. Kepala BSPDM Kalteng Yulindra Dedy, S.STP, M pada penutupan Latsar CPNS Golongan III dan II di Palangka Raya, Rabu (31/07/2019).

Untuk membentuk PNS yang

profesional diperlukan Pelatihan Dasar guna membentuk karakter yang kuat, sejalan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan CPNS menjalani masa percobaan melalui proses pelatihan terintegrasi dalam rangka membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme, kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggungjawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

“Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi yang semakin canggih serta arus globalisasi yang tak terbendung lagi ditandai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan dasar yang lebih efektif dan efisien, maka kita harus tanggap dalam merespon tuntutan tersebut sehingga masyarakat Kalimantan Tengah dapat dengan cepat mewujudkan KALTENG BERKAH”, tegas

Fahrizal Fitri.

Dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data dan robotic yang dikenal dengan fenomena disruptive inovation. “Untuk menghadapi hal tersebut, kita harus memperbaiki pelayanan publik dengan memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada aparaturnya melalui pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta memperluas ilmu pengetahuan dan menanam karakter sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa”, tegas Fahrizal Fitri.

Dari 320 CPNS Golongan III dan II se-Kalteng yang mengikuti Latsar tersebut tercatat 5 orang peserta berhasil meraih nilai tertinggi dan mendapat penghargaan yang diserahkan Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri pada penutupan Latsar tersebut.\*\*\*



## Sekda Kalteng : Pelaksanaan Program Pembangunan Harus Tepat Waktu

Palangka Raya – Biro PKP. (30/07/2019).

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan program-program pembangunan merupakan hal penting agar target pencapaian pembangunan dapat tercapai sesuai dengan target rencana dan waktu yang telah ditetapkan dan hasil evaluasi tersebut sebagai masukan untuk penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019 dan RKPD tahun 2021.

“Karena itu kita harus melakukan percepatan dan pencapaian target kinerja dengan langkah inovatif dan kreatif, namun tetap sesuai ketentuan yang berlaku”, tegas Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Pra Rakordal Program-Program Pembangunan Provinsi Kalteng Triwulan II Tahun 2019 di Aula Bappedalitbang Kalteng, Selasa

Fahrizal Fitri juga menegaskan, selain belanja daerah, hal yang juga penting diperhatikan adalah tuntutan peningkatan penerimaan pendapatan daerah menjadi hal mutlak terkait dengan kemandirian daerah. “Prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Karena itu kita harus kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru”, jelas Sekda Kalteng tersebut.

Fahrizal Fitri mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk bekerja lebih keras lagi dalam upaya mencapai target pembangunan. Untuk

itu diperlukan sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan di setiap sektor dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah BERKAH.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan program pembangunannya harus sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku. “Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran khususnya penyerapan belanja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat serta dapat mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Tengah”, tegas Fahrizal Fitri.\*\*\*

## Sekda Kalteng Harapkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Melalui Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kalimantan Tengah berhasil terpilih 425 orang wakil rakyat yang akan menduduki kursi tersedia di DPRD Kabupaten dan Kota se- Kalteng termasuk 45 kursi DPRD Provinsi Kalteng. Namun Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang merupakan penjabaran UU MD3 itu lebih fokus pada pengaturan mengenai MPR RI, DPR RI dan DPD RI serta tidak merinci pengaturan mengenai DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Mekanisme Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Palangka Raya, Senin (22/07/2019).

Sosialisasi tersebut diikuti Sekretaris DPRD dan Sekretaris KPU Kalimantan Tengah serta Kabag Pemerintahan Setda Kalteng dan Kabupaten/Kota se-Kalteng dengan narasumber Kasubdit Wilayah III Endang Tjatur dan Kepala Seksi Wilayah 3A Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif Kementerian Dalam Negeri Ramort Sitompul.

Sosialisasi itu bertujuan untuk mengetahui tata cara atau mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Anggota Legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memverifikasi dan memvalidasi berkas anggotan legislatif yang terpilih sesuai hasil Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.

Provinsi Kalteng pada September 2020 melaksanakan pemilihan Gubernur/Wagub

Kalimantan Tengah dan Bupati/Wabup Kotawaringin Timur. “Pemerintah Provinsi berharap dengan pengalaman Pemilu Serentak tahun 2019 dapat terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020,” ujar Fahrizal Fitri.

Sekda mengatakan optimalisasi partisipasi pemilih perlu terus dilakukan dengan pemutakhiran metode sosialisasi melalui tatap muka dan penggunaan media komunikasi, termasuk media komunikasi digital. “Diharapkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota agar secara optimal memfasilitasi pelaksanaan Pilkada melalui pembentukan Desk Pilkada, sosialisasi, monitoring dan pemantauan serta penyediaan sarana dan prasarana termasuk SDM yang dapat mendukung kelancaran Pilkada dan peningkatan partisipasi pemilih,” kata Fahrizal Fitri.\*\*\*



## Sekda Kalteng Harapkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Meningkat.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Melalui Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kalimantan Tengah berhasil terpilih 425 orang wakil rakyat yang akan menduduki kursi tersedia di DPRD Kabupaten dan Kota se- Kalteng termasuk 45 kursi DPRD Provinsi Kalteng. Namun Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang merupakan penjabaran UU MD3 itu lebih fokus pada pengaturan mengenai MPR RI, DPR RI dan DPD RI serta tidak merinci pengaturan mengenai DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Mekanisme Pemberhentian

dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Palangka Raya, Senin (22/07/2019).

Sosialisasi tersebut diikuti Sekretaris DPRD dan Sekretaris KPU Kalimantan Tengah serta Kabag Pemerintahan Setda Kalteng dan Kabupaten/Kota se-Kalteng dengan narasumber Kasubdit Wilayah III Endang Tjatur dan Kepala Seksi Wilayah 3A Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan Legislatif Kementerian Dalam Negeri Ramort Sitompul.

Sosialisasi itu bertujuan untuk mengetahui tata cara atau mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Anggota Legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memverifikasi dan memvalidasi berkas anggotan legislatif yang terpilih sesuai hasil Pemilihan Umum serentak Tahun 2019.

Provinsi Kalteng pada September 2020 melaksanakan pemilihan Gubernur/Wagub Kalimantan Tengah dan Bupati/Wabup Kotawaringin Timur. “Pemerintah Provinsi berharap dengan pengalaman Pemilu Serentak tahun 2019 dapat terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020,” ujar Fahrizal Fitri.

Sekda mengatakan optimalisasi partisipasi pemilih perlu terus dilakukan dengan pemutakhiran metode sosialisasi melalui tatap muka dan penggunaan media komunikasi, termasuk media komunikasi digital. “Diharapkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota agar secara optimal memfasilitasi pelaksanaan Pilkada melalui pembentukan Desk Pilkada, sosialisasi, monitoring dan pemantauan serta penyediaan sarana dan prasarana termasuk SDM yang dapat mendukung kelancaran Pilkada dan peningkatan partisipasi pemilih,” kata Fahrizal Fitri. \*\*\*

## Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Pemprov dan DPRD Provinsi Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (22/07). Rapat Paripurna ini beragendakan pembacaan Laporan Hasil Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 sekaligus Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2018.

Acara penandatanganan Persetujuan Bersama merupakan tugas konstitusional seperti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah melalui mekanisme Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, yang telah bekerja maksimal dalam menginventarisir permasalahan yang dibahas mengenai hal-hal yang terkait dengan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

“Pada kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwa untuk flapont dan realisasi belanja daerah yang sebagian belanja belum sepenuhnya tercapai

sesuai dengan target capaiannya, namun semuanya itu merupakan capaian yang patut kita banggakan dan syukuri karena belanja daerah Kalimantan Tengah dapat dianggap wajar, walaupun masih terdapat kekurangan nilai realisasi terhadap target yang telah ditentukan namun kekurangannya tidak mempengaruhi manfaat yang diperoleh dari hasil pembangunan yang dilaksanakan”, kata Gubernur Kalteng.

Gubernur Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa dengan adanya penandatanganan Persetujuan Bersama ini merupakan perwujudan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194 ayat (2) dan pasal 195 ayat (1) bahwa Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah dibahas sehingga menghasilkan komitmen untuk mendapat persetujuan bersama dan selanjutnya Raperda tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.\*\*\*

## Menko PMK RI : Harganas Harus Diimplementasi Secara Konkrit.

Palangka Raya – Biro PKP. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani menegaskan keluarga merupakan pondasi penting dalam membangun kehidupan keluarga sejahtera. Karena itu Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) menjadi penting mengingat tujuannya memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan menyadari betapa strategisnya meningkatkan hubungan kekeluargaan se-Indonesia yang harus diimplementasikan secara konkrit dalam keluarga Indonesia.

Menko PMK Puan Maharani mengemukakan hal itu ketika menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Nasional Ke-26 tahun 2019 di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru (29/06/2019).

Menurut Puan Maharani, Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun pemahaman, kesadaran dan komitmen dalam mewujudkan keluarga yang sehat,

berpendidikan, bermasyarakat dan berbudaya. “Membangun keluarga dan kependudukan Indonesia tentu saja membutuhkan peran aktif anggota keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keluarga dan masyarakat sebagai tempat interaksi yang berkualitas bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama yang berfungsi untuk melindungi, membimbing dan memberdayakan anggota keluarga secara sosial, ekonomi dan budaya”, tegas Menko PMK.

Peringatan Harganas 2019 dengan Take Line : Cinta Keluarga, Cinta Berencana mengajak kita semua bahwa mencintai keluarga berarti kita merencanakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan berbudaya. “Harganas adalah hari kita semua dan kita adalah anggota keluarga Indonesia. Marilah kita bergotong royong mengambil peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga Indonesia, keluarga yang tenteram, keluarga yang sejahtera dan keluarga berbudaya. Selamat Harganas yang ke-XXVI tahun 2019. Hari Keluarga, hari kita semua, semoga Allah

SWT memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua”, jelas Puan Maharani.

Pada puncak peringatan Harganas 2019 di Banjarbaru Kalimantan Selatan tersebut pemerintah menganugerahkan Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan dukungan yang ditunjukkan semua pihak yang telah berjasa dalam memajukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. “Atas nama pemerintah RI, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada penerima tanda penghormatan dan tanda penghargaan. Penganugerahan ini semakin memperteguh komitmen saudar-saudara dalam memajukan kualitas kependudukan dan keluarga Indonesia agar terus berkelanjutan dalam kiprah saudar-saudara dalam masyarakat”, pungkash Puan Maharani.

Keluarga berperan penting dalam membangun budi pekerti, etika dan norma dalam bermasyarakat dan juga memperteguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap keluarga Indonesia perlu dan harus memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam dengan 714 suku bangsa, 1.100 bahasa daerah dan 17.000 pulau. Oleh karena itu keluarga harus bisa menjadi tempat membangun sikap hidup dalam menghargai perbedaan dengan mengedepankan rasa persatuan sebagai keluarga besar Indonesia.\*\*\*





## Kalimantan Tengah Provinsi Ketiga Tuntaskan Blue Print PPM Tambang

Biro PKP, Palangka Raya - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuka secara resmi kegiatan Serah Terima, Penetapan dan Peluncuran Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada usaha pertambangan di Swiss-Bel Hotel Danum Palangka Raya, Rabu (03/07/2019).

Peluncuran Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada usaha pertambangan tersebut menempatkan Kalimantan Tengah menjadi provinsi ketiga di Indonesia yang telah berhasil menuntaskan penyusunan Cetak Biru PPM.

Dokumen Blue Print ini akan menjadi acuan wajib bagi setiap perusahaan tambang di Kalimantan Tengah dalam merancang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di daerah sekitar tambang.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Muhammad Hendrasto menyatakan Kementerian ESDM sangat menyambut baik dan antusias atas terselenggaranya Peluncuran Cetak Biru PPM tersebut. "Melalui acara ini, kami mengucapkan selamat kepada Provinsi Kalimantan Tengah

sebagai provinsi ketiga di Indonesia yang telah menyelesaikan Blue Print PPM", ujarnya.

Blue Print itu menjadi acuan perusahaan pertambangan dalam menyusun rencana induk PPM. "Kami sampaikan juga, Blue Print ini akan menjadi acuan bagi perusahaan pertambangan untuk menyusun rencana induk PPM selama masa operasi dan produksi sampai dengan program pasca tambang. Kami harapkan tujuan sustainable development dapat tercapai dengan target-target yang sudah disusun," imbuh Hendrasto.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri menandakan Program PPM merupakan salah satu upaya serius pemerintah untuk mewujudkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) di dunia tambang. Tujuannya untuk lebih mendorong perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan dan lingkungan tambang secara individual dan kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri." Dengan diluncurkannya dokumen Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat ini, maka akan menjadi pedoman bagi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan se-Kalimantan Tengah untuk menyusun rencana

induk PPM," tegas Sugianto Sabran.

Gubernur mengatakan salah satu wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program PPM. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya. "Dukungan semua stakeholders mutlak diperlukan agar pelaksanaan dan pengawasan program PPM dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalteng", tegas Sugianto.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan Plakat dan Piagam Penghargaan kepada 60 perusahaan pertambangan atas kontribusinya dalam Program PPM. Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan Gubernur Kalteng kepada para pengusaha pertambangan yang sudah patuh melaksanakan kewajibannya.

"Ucapan terima kasih kami sampaikan pada pemegang PKP2B/KK/IUP yang telah patuh dan taat terhadap kewajiban negara dalam bentuk landrent dan royalty. Hal ini ditunjukkan dengan PNPB yang terus mengalami peningkatan pada 2016 tercatat Rp 951 miliar, 2017 naik menjadi Rp 1,7 triliun dan 2018 meningkat menjadi Rp 2,07 triliun dengan realisasi per Juni 2019 mencapai Rp 1,2 triliun," pungkas Gubernur.\*\*\*

## Gubernur : Pemprov Terus Atasi Masalah Pendidikan

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan telah memerintahkan dan terus memantau Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyiapkan dan melaksanakan berbagai program pendidikan dalam rangka membangun dan mengatasi berbagai permasalahan di sektor pendidikan.

"Program yang telah dan terus dilaksanakan meliputi peningkatan Satuan Tugas Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peningkatan Pelayanan Pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil serta Peningkatan Karakter Berbasis Kearifan Lokal," beber Sugianto

Sabran di hadapan Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan II tahun Sidang 2019 DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Jumat (12/7/2019).

Rapat Paripurna yang hanya dihadiri 26 orang Anggota DPRD itu dengan agenda tunggal mendengarkan Jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kalteng tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Menurut Sugianto, program pembangunan sektor pendidikan tersebut termasuk bantuan beasiswa kepada pelajar. "Pemprov Kalteng juga mengadakan program pemberian

beasiswa kepada para lulusan Sekolah Menengah Atas dan SMK yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi," katanya.

Pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2019 juga telah merekrut guru tidak tetap di tingkat SMA, SMK dan SLB sebanyak 2.678 orang untuk mengatasi kekurangan guru dan sebarannya yang belum merata ke seluruh wilayah Kalteng. "Pemprov juga sedang melakukan pemetaan dan re-distribusi guru guna memenuhi kekurangan pada daerah terpencil. Itulah sejumlah program yang kami siapkan dan laksanakan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor pendidikan di Kalteng", tegas Sugianto.\*\*\*



## Gubernur Harapkan Program Kerja Pemuda Muhammadiyah Membumi & Mengakar.

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah berharap Musyawarah Wilayah Pemuda Muhammadiyah dapat menghasilkan program kerja yang menyentuh langsung masyarakat dan sinergis dengan program pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju dan sejahtera.

Harapan Gubernur tersebut disampaikan Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Aula Asrama Haji Al Mabru Palangka Raya, Jumat malam (19/07/2019).

"Saya mengharapkan rencana program lima tahun kedepan (yang dihasilkan) dapat menjadi mitra pemerintah daerah, sama-sama membangun Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, tanah berkah untuk NKRI, bergerak bersama, bersatu mewujudkan Kalteng Berkah (bermartabat,

Elok, Religi, Kuat, Amanah dan Harmonis)", kata Nurul Edy.

Nurul Edy menegaskan rencana program bisa membumi dan realistis. "Rencana program hendaknya bisa membumi dan realistis serta mengakar dengan kearifan lokal dan pada gilirannya dapat diaktualisasikan di tengah-tengah masyarakat sebagai sumbangsih dari warga Pemuda Muhammadiyah terhadap pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah," imbuh Nurul Edy.

Lebih lanjut Asisten II Nurul Edy juga menyampaikan apresiasi Gubernur atas diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Pemuda Muhammadiyah ini. "Muswil Pemuda Muhammadiyah ini tentu sangat penting, karena keberadaan suatu organisasi harus mampu melaksanakan agenda-agendanya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Karena itu saya menyambut baik diadakan Muswil ini", ucap Nurul Edy.

Ketua Panitia Muswil Priyono menjelaskan Muswil X Pemuda

Muhammadiyah ini memiliki empat agenda. "Tujuan kegiatan ini mengevaluasi program kerja Pimpinan Wilayah periode 2014-2019, membahas program kerja periode 2019-2023, membahas isu strategis mengenai pemuda dan kebangsaan serta pemilihan Pimpinan Wilayah periode 2019-2023", terang Priyono.

Pembukaan Muswil X itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Wakil Gubernur Kalteng dua periode 2005-2015 Ahmad Diran, Pejabat mewakili Danrem 102/PJG, Ketua PW Muhammadiyah Kalteng H. Ahmad Syar'i, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalteng periode 2014-2019 Daryana dan pengurus PP Muhammadiyah Pusat.

Musyawarah Wilayah X Pemuda Muhammadiyah Kalteng 2019 mengusung tema "Menggembirakan Dakwah Islam Menuju Kalteng Berkah", diikuti seluruh perwakilan Pemuda Muhammadiyah se-Kalimantan Tengah dengan total jumlah peserta sekitar 152 orang. berlangsung selama 3 hari dari tanggal 19 s.d 21 Juli 2019.\*\*\*

## Gubernur Sugianto Sabran Tegaskan Spektrum Bela Negara Sangat Luas

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 menyatakan : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. "Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan bela negara sebagai implementasi hak dan kewajiban warga negara yang di atur dalam konstitusi", tegas gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten II Sekda Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy ketika membuka Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara di Palangka Raya, Senin (22/07/2019).

Tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara maupun keselamatan segenap bangsa memasuki era milenium tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman

Militer, tetapi sudah bersifat multidimensional dan berada di setiap lini kehidupan. "Karena itu bentuk aktualisasi kecintaan kepada tanah air atau patriotisme dan nasionalisme sudah tentu jauh berbeda dengan era perjuangan para pendahulu kita, karena bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi pun berbeda", ungkap gubernur.

Ditegaskan, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Bela Negara merupakan tugas segenap warga negara Indonesia sesuai kemampuan dan profesi dalam kehidupannya

mengingat spektrum Bela Negara sangat luas mulai hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata di bidang ideologi, politik, sosial, budaya maupun musuh bersenjata.

Sosialisasi bela negara ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sistem yang bersifat semesta di Provinsi Kalimantan Tengah lebih meningkat lagi untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang "BERKAH" (Bermartabat, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara itu diikuti perwakilan OPD Provinsi Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan berlangsung tanggal 22 sampai dengan 23 Juli 2019 di Ballroom Aquarius Hotel Palangka Raya.\*\*\*

## **Ketum Dekranas Hj.Mufidah JK Resmikan Gedung Dekranasda Kalteng**

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah memiliki banyak jenis Sumber Daya Alam yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk kerajinan dengan mengangkat kekhasan daerah seperti anyaman, batu-batuan dan sumber daya alam lainnya yang dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan industri kerajinan.

Untuk mengelola Sumber Daya Alam yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk kerajinan itu memerlukan sinergitas Program Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas dan TP-PKK hingga ke tingkat daerah. “Industri kerajinan merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang berkembang pesat dan sangat dekat dengan keseharian masyarakat sehingga dapat dijadikan mata pencaharian masyarakat, termasuk di Kalimantan Tengah ini”, jelas Ketua Umum Dekranas Hj.Mufidah Jusuf Kalla ketika meresmikan Gedung Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. Imam Bonjol Palangka Raya, Senin (15/07/2019).

Menurut Mufidah JK, dengan berkembangnya produk kerajinan lokal, maka persaingan akan semakin besar dan ketat sehingga memerlukan upaya nyata untuk mendorongnya agar bisa bersaing dengan daerah lain. Karena itu diperlukan sinergitas sejumlah pihak terkait dalam mengatasi berbagai permasalahan, mengingat para pengrajin memiliki keterbatasan dalam upaya meningkatkan produk kerajinan lokal. “Dekranasda juga dapat membantu pengembangan sektor pariwisata Kalteng dan cermat dalam menentukan produk kerajinan yang akan dikembangkan, termasuk dalam menentukan harga penjualannya sehingga terjangkau oleh daya beli masyarakat”, beber Mufidah JK.

Ketua Umum Dekranas

itu juga meminta Dekranasda Kalteng agar selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memaksimalkan p e n g e m b a n g a n kerajinan lokal serta memanfaatkan teknologi informasi sehingga produk kerajinan lokal bisa mengikuti tren pasar dan tidak kalah bersaing. “Pelaku UMKM mesti bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengembangan kerajinan agar hasilnya berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat”, imbuh Mufida JK.

Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Kalteng Yulistra Ivo Azhari Sugianto Sabran mengatakan fihaknya terus berupaya mengembangkan dan melestarikan kerajinan lokal khas Kalteng Kerajinan Benang Bintik sesuai Visi Misi Pemerintah Daerah mencapai Kalteng BERKAH. “Ke depan, kami akan lebih menggali potensi kerajinan di Kalteng terutama kerajinan yang bersumber dari kearifan lokal seperti menganyam dengan bahan baku rotan dengan motif khas suku Dayak dan mengembangkan Benang Bintik atau Batik dengan kreasi khas Kalteng”, terang Yulistra Ivo Sugianto Sabran.

Para pengrajin juga diharapkan terus menjual produk khas daerah masing-masing dan mempertahankan kualitas produk tersebut agar semakin dikenal dan diminati hingga menembus ke pasar dunia.

“Dekranasda dan TP PKK Kalteng juga terus bersinergi dengan Program Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam



melakukan pelatihan vokasional kreasi dan perpaduan anyaman lokal dengan bahan kulit dan kain serta mengembangkan kerajinan tenun dengan motif khas Kalteng seperti motif balanga, kalakai, batang garing dan motif lainnya”, imbuh Yulistra Ivo Sugianto Sabran.

Peresmian Gedung Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah dan Central Borneo Souvenir itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh Mufidah JK yang didampingi Ketua Dekranasda Kalteng Ny. Ivo Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, Ketua Dewan Kehormatan Dekranas Tuti Tri Sutrisno dan Herawati Boediono serta Umum TP PKK Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.\*\*\*





## Gubernur Tegaskan Kalteng Butuh Kepastian dan Keadilan Ekonomi.

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi calon Ibukota Negara menyusul keputusan pemerintah memindahkan Ibukota Negara keluar Pulau Jawa. Keputusan memindahkan Ibukota Negara keluar Pulau Jawa itu ditindaklanjuti dengan berbagai kajian yang bersifat strategis dan ilmiah dari berbagai sektor di Kalimantan Tengah. “Di mana pun nanti Ibu Kota Baru akan terpilih, Kalimantan akan mendapatkan dampak pertumbuhan secara kewilayahan yang sangat signifikan. Kementerian PPN/ Bappenas telah mengukur dampak ekonomi pemindahan Ibukota dan melakukan modelling di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai kandidat Ibukota Negara”, ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas Rudy S. Prawiradinata selaku Pembicara Utama pada Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara : Kalimantan Untuk Indonesia dengan tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya, Jumat (19/07/2019).

Rudy S. Prawiradinata menambahkan, jika Ibukota Negara pindah ke Kalimantan maka pergerakan perdagangan dalam provinsi Ibukota Baru dan antar provinsi di Indonesia akan bergerak sangat positif. “Kalau Ibukota pindah ke Kalimantan diprediksikan lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain dan keterkaitan ekonomi Ibukota Baru dengan provinsi lain juga akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain”, ungkap Rudy S. Prawiradinata.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas itu

lebih lanjut menjelaskan kondisi Kalimantan Tengah memiliki luas deliniasi kawasan sekitar 401.364,16 hektar dan lokasi potensial sekitar 40.962,62 hektar. Selain ketersediaan lahan juga didukung kuantitas air permukaan yang dapat diperoleh melalui dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yaitu DAS Kahayan dan DAS Katingan, bahkan daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas sedang, namun Kalimantan Tengah memiliki historis kebakaran hutan cukup banyak sehingga perlu menjadi perhatian.

Kalimantan Tengah juga memiliki Pelabuhan Laut Sampit dan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya masing-masing jaraknya sekitar 219 km dan 149 kilometer dari lokasi deliniasi, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan memiliki akses darat, udara dan laut.

Penetapan pemindahan Ibu Kota Negara akan dilakukan tahun ini dan tinggal menunggu keputusan Presiden. “Penetapannya dalam tahun ini, mungkin dalam waktu dekat Presiden akan mengumumkan, tapi kita belum tahu persisnya kapan,” ucap Rudy.

Rudy S. Prawiradinata mengatakan Kalimantan Tengah dari sisi kriteria telah memenuhi syarat sebagai salah satu calon Ibu Kota Negara. “Dari sisi kriteria semua memenuhi syarat, tentu semuanya ada kekurangan dan kelebihannya, mungkin seperti yang didiskusikan tadi tentunya kekurangannya akan diminimalisir sedemikian rupa,” ujarnya kepada awak media se usai menjadi narasumber dalam Dialog Nasional tersebut.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan beberapa hal seputar tema Dialog Nasional “Menuju Ibu Kota Masa Depan : Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” tersebut. Disebutkan,

provinsi Kalimantan Tengah terluas kedua setelah Papua dan memiliki lahan luas dengan penduduknya sedikit serta secara sosiologi masyarakat Dayak terbuka dan penuh persahabatan. Selain itu, cost infrastruktur dan cost sosial Kalimantan Tengah lebih kecil dibandingkan lokasi-lokasi lain. “Mengolah Kalimantan Tengah itu gampang. Mau seperti apa pusat pemerintahan ini, lebih gampang dari lokasi yang lainnya. Lahan gambut, banjir, bisa kita kendalikan”, beber Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran juga menjelaskan keberhasilan di Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola perhutanan sosial dengan tanaman sengon yang bisa dikembangkan dengan baik. Demikian juga di sektor pertanian berhasil mengelola padi organiknya dengan bagus di lahan gambut, bahkan kebakaran lahan gambut tidak akan terjadi jika lahan itu diolah jadi produktif. “Kebakaran lahan tidak akan ada apabila diolah jadi lahan produktif. Yang penting ada kepastian dan keadilan ekonomi yang harus ditegakkan sebelum pemindahan Ibu Kota Negara.” tegas Gubernur Sugianto Sabran.

Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Tengah menjadi salah satu calon lokasi Ibu Kota Negara yang dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya.

Dialog Nasional itu dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sebagai pembicara utama serta unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng, akademisi dan budayawan.\*\*\*

## **Ketua Wantimpres : Ekonomi Berbasis Digital Kalteng Akan Tumbuh Baik**



Palangka Raya – Biro PKP. Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Ketua Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Sri Adiningsih beserta rombongan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Senin siang (22/07/2019).

Agenda pertemuan Wantimpres dengan Pemerintah Provinsi Kalteng ini membahas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Indonesia di Era Digital khususnya dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya kemajuan berbagai teknologi komunikasi.

Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri menyambut baik kunjungan Ketua Wantimpres ke Provinsi Kalimantan Tengah seraya berharap kunjungan tersebut bermanfaat bagi Kalimantan Tengah. "Ini luar biasa, kami berharap dengan kunjungan Ibu ke Kalimantan Tengah bisa secara langsung nyata melihat keadaan Kalimantan Tengah. Besar harapan kami kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,

khususnya dalam pengembangan ekonomi di era digital," ujar Fahrizal Fitri.

Pada pertemuan tersebut Prof. Sri Adiningsih menjelaskan kemajuan pesat teknologi telah membuat transformasi digital merambah ke semua bidang, termasuk ekonomi. Terbukti ekonomi berbasis digital banyak bermunculan dan berkembang menjadi usaha besar seperti Go-Jek, Tokopedia, Traveloka dan Buka Lapak. "Antusiasme, terutama anak-anak muda, terkait ekonomi berbasis digital itu luar biasa. Startup (perusahaan yang berbasis digital) biasanya tumbuh berkembang mulai dari kecil, kemudian besar menjadi (seperti) Go-Jek, Traveloka, Tokopedia dan Buka Lapak, itu kan bermula dari startup kecil." ungkap Sri Adiningsih.

Ketua Wantimpres Sri Adiningsih ketika ditanya potensi ekonomi digital di Kalteng dalam keterangannya persnya dengan lugas menjawab bahwa ekonomi berbasis digital sudah berkembang. "Ekonomi berbasis digital sudah mulai berkembang di Palangka Raya dan sekitarnya. Saya kira akan lebih tumbuh lagi, karena nampaknya generasi

milennial di sini cukup "melek" digital dan memiliki semangat untuk memanfaatkan itu," tegasnya.

Banyak peluang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital. "Banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik itu menjual produk Kalteng atau tujuan wisata, dengan memanfaatkan kemampuan digitalnya agar bisa berkreasi dan memajukan ekonomi Kalteng. Saya yakin nanti akan muncul startup-startup dari Kalteng yang bisa mendorong pertumbuhan kehidupan masyarakat di Kalteng," pungkas Sri Adiningsih.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Danrem 102/PJG Kolonel Arm. Saiful Rizal, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, Wadirbinmas Polda Kalteng AKBP Andika Wiratama, Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah serta sejumlah kepala instansi vertikal, Kepala SKPD Provinsi Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala SMK. Ketua Tim Wantimpres Sri Adiningsih dan rombongan mengunjungi beberapa SMK di Palangka Raya sebelum kembali ke Jakarta hari Selasa sore (23/07/2019).\*\*\*





## Program BUN500, Mentan Amran Sulaiman : Kita Buat Tonggak Sejarah Dari Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Kalimantan Tengah mendapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian RI menjadi provinsi penyelenggara Peluncuran Program Benih Unggul Perkebunan 500 Juta Batang (BUN500). BUN 500 merupakan program penyediaan 500 juta benih unggul dalam kurun waktu 2019-2024. Program ini digagas Kementerian Pertanian RI dalam rangka memacu peningkatan produksi komoditas perkebunan sehingga mampu menghasilkan komoditas bernilai ekonomis tinggi di pasar dunia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta jajaran atas kepercayaan yang diberikan selaku tuan rumah BUN500 yang merupakan program nasional dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian,” ucap Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran saat mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menghadiri Launching (Peluncuran) Program BUN500 (Benih Unggul Perkebunan 500 Juta Batang) di Desa Sido Mulyo, Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Kamis pagi (18/7/2019).

Ditetapkannya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah peluncuran Program BUN500 merupakan kehormatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah. “Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami (Kalimantan Tengah) dapat menjadi tuan rumah kegiatan bersifat nasional, sehingga nanti jutaan bibit tanaman perkebunan yang akan dibagikan ke seluruh Indonesia, akan selalu diingat bahwa mulanya (Peluncuran BUN500) adalah dari provinsi Kalimantan Tengah,” lanjut Sugianto Sabran.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman

pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa program Benih Unggul Perkebunan 500 juta batang adalah upaya untuk mengembalikan kejayaan perkebunan Indonesia dan program BUN500 ini dilaksanakan mulai dari Provinsi Kalimantan Tengah. “Akhirnya, kami buat tonggak sejarah, kita memulai dari Kalimantan Tengah ini. Provinsi lain juga bagus, jangan kecil hati, seluruh Indonesia hadir, semua bagus, tapi Allah menakdirkan kita launching BUN500 di Kalimantan Tengah ini.” jelas Andi Amran Sulaiman.

Sejak tahun 1602 Indonesia dikenal dengan rempah-rempahnya. “Kita baca sejarah, pada tahun 1602 Indonesia dikenal dengan rempah-rempah. Spanyol, Inggris dan Belanda datang karena rempah-rempah, bukan karena tambang. Artinya ada potensi, ada raksasa tidur harus kita bangun, kembalikan kejayaan rempah-rempah dan perkebunan Indonesia, pasti bisa”, tegas Menteri Pertanian.

Lebih lanjut Menteri Amran Sulaiman dalam keterangan persnya menjelaskan program BUN500 akan mengedepankan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga menumbuhkan nilai ekspor dengan memprioritaskan 10 (sepuluh) komoditas yang menjadi

primadona dunia.

“Ke depan, pendekatannya adalah bagaimana petani sejahtera, bagaimana kita tingkatkan ekspor. 500 juta batang (benih unggul) ini kita akan membagikan gratis kepada petani Indonesia selama 5 tahun, ini program kita, 100 juta per tahun”, ungkap Amran Sulaiman.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian pertanian juga memprioritaskan bibit, benih dan primadona komoditas ekspor. “Kita memprioritaskan bibit dan benih yang dibutuhkan dunia. Yang menjadi primadona komoditas ekspor ada 10 yang kami siapkan yaitu kopi, lada, cengkeh, pala, kakao, karet, kelapa dalam, tebu, teh, dan jambu mete,” pungkas Menteri Amran Sulaiman.

Sebelum peluncuran, Menteri Amran Sulaiman dan Gubernur Sugianto Sabran bersama Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyo meninjau lokasi Persemaian Bibit kakao dan kopi robusta yang dibudidayakan oleh calon mitra program BUN500. Setelah peninjauan tersebut Menteri Pertanian dan Gubernur Kalteng langsung meluncurkan secara simbolis Program BUN500, yang dilanjutkan dengan pelepasan 70 truk berisi puluhan ribu benih unggul siap salur. Launching BUN500 ini diikuti sekitar 2.000 peserta terdiri dari Kepala Dinas Perkebunan se-Indonesia dan kelompok-kelompok tani serta warga sekitar Desa Sido Mulyo.\*\*\*



## KALTENG MENUJU SMART CITY UNTUK WUJUDKAN SMART PROVINCE



Palangka Raya – Biro PKP. Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di mana masyarakat dapat berperan dan terlibat aktif dalam proses pembangunan bahkan ikut serta menjadi kontrol sosial. “Kondisi keterbukaan tersebut tentu karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi kita untuk memanfaatkannya dengan baik”, kata Sekda Kalteng Fahrizal Fitri dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nurul Edy di hadapan peserta Rakor Teknis Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis

(25/07/2019).

Fahrizal Fitri menilai Rakornis tersebut sebagai langkah strategis untuk menghasilkan pemikiran yang aktual dan visioner dalam pembangunan bidang Komunikasi khususnya dalam menghadapi tantangan era global dan era digital. Karena itu Smart Province merupakan sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini.

Terciptanya Smart Province tentu merupakan akumulasi dan

kontribusi dari Kabupaten/ Kota dalam mewujudkan Smart City pada masing-masing Kabupaten/ Kota. “Jadi Smart Province hanya bisa tercapai apabila semua Kabupaten/Kota di Kalteng memenuhi kriteria Smart City dan Saya mencermati Rakornis ini sangat selaras dengan tema yang diusung yakni menciptakan Smart City untuk mewujudkan Kalteng Smart Province”, beber Sekda.

Visi Pembangunan Kalteng 2016-2021 adalah Kalteng Maju, Mandiri dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH adalah sebuah cita-cita besar untuk diwujudkan secara bersama. Karena itu memerlukan peran serta semua sektor termasuk sektor Kominfosantik yang memegang fungsi strategis dalam menjalankan Misi Ke-5 yakni Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional,

Adil dan Anti Korupsi. Pemantapan tersebut menurut Fahrizal Fitri tentu melalui pemanfaatan teknologi dan informasi berbasis elektronik yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari sektor Informasi Publik.

Saat ini telah dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara modern, transparan dan akuntabel sehingga fungsi kontrol masyarakat semakin kuat. “Teknologi informasi merupakan daya ungkit utama dalam kemajuan peradaban dunia. Kemajuan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, transparan dan berkeadilan sebagai jembatan yang efektif bagi pemerintah untuk melayani rakyatnya”, tegas Fahrizal Fitri.

Rakornis Bidang Kominfosantik se-Kalteng itu diikuti Pejabat dan Staf Teknis Kominfosantik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Bappeda dan Pejabat Struktural yang menangani Persandian dan Statistik Kabupaten/Kota se-Kalteng. “Tujuannya antara lain menyatukan pemahaman tentang konsep dan implementasi Smart City pada Kabupaten/Kota se-Kalteng, meningkatkan pemahaman terhadap dukungan sektor lain dalam mewujudkan Smart Province serta mengoptimalkan fungsi sektor Kominfosantik dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kalteng 2016-2021 menuju Kalteng BERKAH”, jelas Kepala Dinas Kominfosantik Kalteng Herson B.Aden.\*\*\*



## **Gubernur Sugianto Nilai Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalteng**

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk membangun Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan. Pembangunan Pipa Gas Bumi itu dinilai akan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Demikian diutarakan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Prospek Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kalimantan Melalui Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Trans Kalimantan di Palangka Raya, Rabu pagi (31/07/2019).

Gubernur H. Sugianto Sabran menyatakan pembangunan Pipa Ruas Transmisi (Gas Bumi) Trans Kalimantan merupakan rencana strategis yang sangat penting, mengingat ketersediaan infrastruktur energi yang berasal dari potensi migas dan sumber daya alam lain sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah sangat mendukung terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion ini, dalam memantapkan rencana pembangunan pipa ruas transmisi trans Kalimantan yang akan berimbas bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah,” jelas Gubernur Sugianto Sabran.

Hal senada dikemukakan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa saat berbicara mengenai manfaat pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan. “Satu hal perlu saya sampaikan, terdapat 5 (lima) manfaat pengembangan gas bumi di Kalimantan antara lain tercapainya Ketahanan dan Kedaulatan Energi Nasional,



sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat”, ucapnya.

Lebih lanjut, M. Fanshurullah Asa menjelaskan pembangunan pipa gas Trans Kalimantan sudah masuk kedalam RPJMN tahun 2020 –2024, sehingga dibutuhkan data kebutuhan riil gas bumi di Pulau Kalimantan untuk dapat mewujudkan Kalimantan menjadi green energy.

Disebutkan, berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2018–2027 diprediksikan Kalimantan akan mengalami surplus persediaan (supply). Selama ini mayoritas pasokan diolah menjadi LNG domestik dan komoditas ekspor, namun pemanfaatannya masih belum optimal. Khususnya di Kalimantan hanya diperuntukkan bagi penggunaan transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, industri hingga pembangkit listrik, padahal potensi pengembangan sumber gas di wilayah Kalimantan ini sangat besar.

Pasokan gas bumi wilayah Kalimantan diperkirakan mencapai 2.609,49 MMSCFD pada tahun 2024, dengan potensi kelebihan pasokan gas bumi pada tahun 2025 diperkirakan sebanyak 40 kargo gas alam cair (LNG) atau sebesar 116.769,6 MMSCF.

Pembangunan Jalur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan direncanakan sepanjang 2.019 kilometer sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Tahun 2012–2025. Jalur Pipa Gas tersebut akan membentang dari Bontang–Banjarmasin–Palangka Raya- Pontianak, yang akan mengangkut Gas Bumi dari Bontang dan Natuna guna memenuhi kebutuhan energi gas alam di seluruh Pulau Kalimantan.

FGD tersebut dihadiri Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Komite BPH Migas, Bupati Sukamara Windu Subagio, Bupati Barito Selatan Edy Raya Syamsuri, Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Wakil Bupati Kapuas H.M. Nafiah, Wakil Bupati Katingan Sunardi, Wakil Bupati Seruyan Iswanti, Sekretaris Daerah kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, dan Perangkat Daerah terkait.

FGD BPH Migas tersebut berlangsung 2 (dua) hari mulai tanggal 31 Juli s.d. 1 Agustus 2019 yang dihadiri seluruh Pemerintah Provinsi se-Kalimantan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan, Badan Usaha, HIPMI, INKINDO, dan KADIN serta stakeholders terkait.\*\*\*

## **Gubernur : Manfaatkan Aset Restorasi Gambut Untuk Kelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TGRD) hingga tahun 2018 berhasil membangun berbagai aset fasilitasi restorasi gambut diantaranya 9.600 sumur bor, 2.534 Sekat Kanal, 15 unit Penimbunan Kanal, 350 hektar Revegetasi dan 97 paket Revitalisasi Ekonomi.

Kemudian tahun 2019, program restorasi gambut yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan dan Pulang Pisau meliputi Sekat Kanal 341 unit, 1.243 unit sumur bor, Revegetasi seluas 100 Hektar dan 54 paket Revitalisasi Ekonomi.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengingatkan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) agar semua aset, fasilitasi dan bantuan Program Restorasi Gambut tersebut dapat terus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelestarian lingkungan gambut dan juga kesejahteraan masyarakat.

Pesan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri selaku Ketua TGRD Kalteng saat menghadiri Rapat Koordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) RI Nazir Foad di Kahayan Ballroom Swiss-Bel Hotel Danum, Palangka Raya, Selasa siang (30/07/2019).

Gubernur Sugianto Sabran mengharapkan Bupati Bupati, Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya telah dilaksanakan restorasi gambut agar memanfaatkan

dan mengoptimalkan aset-aset restorasi yang sudah terbangun untuk kelestarian gambut dan kesejahteraan masyarakatnya. “Masyarakat yang menerima bantuan juga dapat bertanggung jawab dan melaksanakan usahanya dengan bersungguh-sungguh dan sampai berhasil sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya,” imbuhnya.

Gubernur Sugianto Sabran juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua stakeholders yang telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah. “Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, baik itu Badan Restorasi Gambut, TRGD, Masyarakat dan NGO serta semua unsur sumber daya Restorasi gambut yang selama ini telah aktif dan peduli pada upaya perbaikan hidrologis gambut serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah”, katanya.

Sementara itu Kepala BRG RI Nazir Foad mengatakan Provinsi Kalimantan Tengah selalu menjadi nomor satu dari 7 provinsi dalam menetapkan program kerja. “Rakor pada hari ini istimewa, karena Kalteng selalu menjadi provinsi nomor satu di antara tujuh

provinsi, di dalam kita menetapkan program kerja. Kalau kita lihat anggaran juga, selalu anggaran terbesar dari tujuh provinsi BRG bekerja, itu juga Kalteng”, jelasnya.

Pada Rakor tersebut diberikan penghargaan kepada tiga orang petani atas sumbangsinya dalam program restorasi gambut masing-masing Rina Ketua Kelompok Tani Kabali Makmur Desa Henda sebagai Pelaksana Revitalisasi Ekonomi Restorasi Gambut Terbaik Tahun 2018; Taufik Rahman warga Desa Buntoi sebagai Pelaksana Revitalisasi Ekonomi Pendukung Operasi Pembasahan Gambut Tahun 2018 dan Yanir Kepala Desa Anjir Kalampan sebagai Kepala Desa Pendukung Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2018.

“Kami sangat berterima kasih kepada Badan Restorasi Gambut yang telah membantu dan membina kami selama ini (sebagai) petani. Dengan adanya bantuan dari BRG, kami, masyarakat Desa Henda, merasa terbantu, dan ekonomi kami pun saat ini ada peningkatannya,” demikian testimoni Rina, salah satu pemenang penghargaan.\*\*\*





## Wagub Kalteng Ajak ISEI Berkontribusi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kalteng

Palangka Raya – Biro PKP. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya Dr. Miar Bakar, M.Si terpilih dan dilantik sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palangka Raya Periode 2019-2022 oleh Kepala Bidang III ISEI Pusat Prof.Arie Kuncoro di Aula Universitas Palangka Raya, Senin (15/07/2019).

Seusai Pelantikan Ketua dan Pengurus ISEI Cabang Palangka Raya Periode 2019-2022 tersebut dilanjutkan dengan Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Regional yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya dan Walikota Palangka Raya Fairid Naparin serta Civitas Akademika dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UPR.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya mengajak seluruh anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang tersebar di provinsi Kalimantan Tengah agar

memberikan kontribusinya dan terlibat aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalteng. Meningkatkan dan memajukan perekonomian daerah sangat memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak termasuk para pakar ekonomi. “Untuk itu, kami mengajak pengurus maupun anggota ISEI yang ada di provinsi ini agar ikut dan terlibat aktif memberikan masukan kepada pemerintah sehingga perekonomian semakin baik dan maju”, jelas Habib Ismail Bin Yahya.

Dijelaskan, pembangunan infrastruktur dan bonus demografi atau lebih besarnya jumlah penduduk produktif sangat perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika infrastruktur memadai dan penduduk produktif lebih mendominasi maka pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya mengalami peningkatan, terlebih lagi penduduk Kalteng hanya dikisaran 2,6 juta jiwa dengan luas

wilayahnya 1,2 kali Pulau Jawa. “Untuk itulah, keberadaan dan peran ISEI sangat dituntut untuk berkontribusi serta memerhatikan upaya peningkatan ekonomi yang telah dan akan dilakukan pemerintah se-Kalteng,” ucap Habib Ismail.

Wagub Kalteng itu yakin terhadap keberadaan para pakar ekonomi yang tergabung di dalam ISEI mampu memberikan masukan dan ide bahkan kritik bersifat membangun kepada pemerintah daerah. Hal itu mengingat para pakar ekonomi memiliki wawasan luas dalam melihat potensi suatu daerah yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.”Kami menyadari, banyak sektor yang harus diperhatikan dalam pembangunan Kalteng. Untuk itulah keberadaan berbagai pihak termasuk ISEI yang tahu masalah ekonomi, harus memberikan dukungan serta bantuan kepada Pemerintah Daerah Kalteng,” demikian Habib Ismail.\*\*\*

## Penduduk Miskin Di Kalteng Terus Mengalami Penurunan

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah era kepemimpinan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya dalam kurun waktu dua tahun terakhir berhasil menurunkan angka kemiskinan. Data statistik menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan) di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 sebanyak 137.884 orang atau 5,37 % dan sampai posisi September 2018 terjadi penurunan menjadi 136.446 orang atau 5,10 % sehingga membuktikan terjadi penurunan 1.438 penduduk miskin di Kalimantan Tengah.

“Keberhasilan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menurunkan angka kemiskinan tersebut menempatkan

Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang ditargetkan memberikan kontribusi dalam penurunan kemiskinan secara nasional yaitu termasuk dalam 5 besar tingkat kemiskinan terendah dibandingkan tingkat kemiskinan secara nasional adalah DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Bangka Belitung”, ungkap Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng di hadapan peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng 2019 di Palangka Raya, Selasa (9/7/2019).

Disebutkan, karakteristik kemiskinan di Indonesia pada umumnya terjadi ketimpangan kemiskinan antar wilayah serta terkendalanya akses dan kualitas pelayanan dasar

terhadap penduduk miskin. “Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut pemerintah telah mengucurkan berbagai kebijakan dan program secara nasional dan daerah melalui kebijakan subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasar”, beber Habib Ismail.

Program tersebut meliputi program perlindungan sosial seperti Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda, Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Kalteng Berkah dan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin untuk menekan angka kemiskinan. “Upaya mewujudkan dan mencapai target penurunan angka kemiskinan itu memerlukan komitmen bersama dan kerja keras semua pihak terkait dengan mensinergikan semua program

pusat dan daerah serta sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk upaya percepatan penyerapan dana pembangunan”, kata Habib Ismail.

Perekonomian Kalteng 2020 akan menunjukkan capaian yang membaik dengan semakin tingginya sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah termasuk dengan sektor swasta dan masyarakat. “Tentunya sinergitas dan sinkronisasi antar pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui keadaan-keadaan di pedesaan”, katanya dengan optimis.

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diikuti Bupati dan Walikota se-Kalteng itu untuk menyampaikan rumusan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dan program yang telah disusun untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan beban dan perbaikan kualitas hidup masyarakat serta mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas masyarakat miskin.

Menurut Habib Ismail Bin Yahya, pembangunan infrastruktur khususnya jalan sampai ke pedesaan yang disertai langkah pasti dengan program pembuatan

kolam-kolam dan penyaluran bibit ikan bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan

Untuk itu pemerintah Kalimantan Tengah mengharapkan pemerintah pusat dalam menetapkan target-target bantuan atau subsidi yang langsung mengena kepada masyarakat wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. “Jadi perlu juga adanya pemuktahiran data untuk mengisi atau memperbaharui data terakhir sehingga diharapkan bantuan yang ada tepat sasaran” pungkas Wagub.\*\*\*

### Gubernur Ajak Masyarakat Beralih Ke Usaha Budidaya

Palangka Raya – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran terus memompa semangat masyarakat Kalimantan Tengah termasuk warga masyarakat yang berdomisili pada wilayah yang terpilih menjadi calon Ibukota Negara.

“Salah satu wilayah tersebut adalah Kabupaten Katingan. Saya mengharapkan masyarakat lokal menyiapkan diri sehingga mampu bersaing di berbagai sektor mengingat masyarakat lokal termasuk pekerja keras, cerdas dan orang-orang pintar”, kata Sugianto Sabran pada peringatan Hari Jadi Ke-17 Kabupaten Katingan 2019 di halaman Kantor Bupati Katingan (30/07/2019).

Dijelaskannya, jika nantinya Ibukota Negara ditetapkan di Kalimantan Tengah maka masyarakat harus mengintensifkan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor termasuk pengelolaan budidaya perikanan, pertanian dan kelautan. Usaha budidaya tersebut dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan di bidang pangan, bahkan gubernur mengharapkan Sumber Daya Alam Kalteng tidak semuanya dijual mentah.

“Jika terjadi pemindahan Ibukota Negara maka jumlah

penduduk Kalteng akan semakin bertambah sehingga memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah besar dan yang memberikan makan harus melibatkan peran orang lokal. Masyarakat Dayak harus jadi tuan rumah di rumahnya sendiri”, tegas Sugianto Sabran.

Hal tersebut lanjut gubernur, bertujuan mengangkat harkat dan martabat masyarakat lokal termasuk masyarakat Dayak sehingga secara otomatis mengangkat perekonomian masyarakat. Itu semua harus didukung dengan kesiapan SDM yang mau bekerja keras.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran juga menyatakan komitmennya terus menggelontorkan dana multiyear setelah proyek multiyear yang sedang berjalan ini berakhir tahun 2020. Mulai tahun 2021 pemerintah provinsi Kalteng akan menggelontorkan dana sebesar Rp. 1,350 triliun untuk 14 Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Katingan.

Seusai peringatan Hari Jadi Kabupaten Katingan 2019 tersebut, Gubernur Sugianto Sabran dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran melakukan Temu

Ramah dengan anak-anak PAUD se-Kota Kasongan di gedung Pertemuan Salawah Kasongan dan siswa SMA se-Kasongan di SMA Negeri 2 Katingan Hilir.

Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran selaku Bunda PAUD dalam pertemuannya dengan anak-anak PAUD di Kasongan meminta Guru-Guru PAUD dan orang tua anak agar terus memperhatikan dan memantau tumbuh kembang anak-anak sehingga kekurangan gizi pada anak (stunting) bisa ditekan seminimal mungkin. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Guru PAUD dan orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak sehingga anak-anak terbebas dari stunting”, kata Ivo Sugianto Sabran.

Sementara itu Sugianto Sabran dalam temu ramah dengan siswa SMA se-Kota Kasongan meminta siswa SMA di Kabupaten Katingan terus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan ahklak yang baik sehingga Kabupaten Katingan mampu melahirkan generasi muda yang bertanggungjawab akan masa depan bangsa dan negara. “untuk itu belajar dengan tekun dan kerja keras, jaga diri dari pengaruh narkoba, minuman keras dan pergaulan bebas”, tegas gubernur.\*\*\*



## Gubernur : Jadikan “Hari Jadi” Semangat Percepat Pembangunan.



Palangka Raya – Biro PKK. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengajak seluruh komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan agar menjadikan peringatan Hari Jadi Ke-69 Kabupaten Barito Utara tahun 2019 sebagai pemacu semangat baru dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan semangat kebersamaan, kerja keras, kekompakan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat Barito Utara. “Apabila hal itu sudah kita lakukan secara bersama, maka berbagai hambatan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Barito Utara dapat teratasi”, beber Sugianto Sabran pada peringatan Hari Jadi Ke-69 Kabupaten Barito Utara di lapangan Tiara Batara Muara Teweh, Selasa (29/07/2019).

Keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Barito Utara harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi, karena di balik keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa kekuarangan

yang harus diperbaiki. “Kita kembangkan dan tingkatkan budaya gotong-royong, keterbukaan, kesetaraan serta saling menghormati dalam filosofi HUMA BETANG dan BELOM BAHADAT” tegas gubernur.

Memasuki usia yang ke-69 tahun tercatat beberapa prestasi yang diraih Kabupaten Barito Utara antara lain meraih penghargaan Aditya Karya Mahtva Yodha 2017 dari Kemensos RI sebagai Kabupaten

seusai menghadiri Peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Utara 2019, melakukan temu ramah dengan pelajar SMA/SMK dan Madrasah Aliyah se-Kota Muara Teweh. “Saya mengharapkan pelajar SMA/SMK dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Barito Utara ini menjauhkan diri dari narkoba, pergaulan bebas dan minuman keras karena dapat merusak harapan dan masa depan generasi muda”, jelas Ivo Sugianto Sabran.

Ketua TP PKK Kalteng



yang berhasil menjalankan tugas Pembina Karang Taruna. Selain itu juga meraih penghargaan atas keberhasilan penyelenggaraan Program Imunisasi 2015 s.d 2017 dari Kementerian Kesehatan RI dan 5 tahun berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI sejak tahun 204 s.d 2018.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 39, 268 miliar kepada pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk pembangunan infrastruktur jalan dan rumah ibadah.

Sementara itu Ketua TP PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran dan Ketua TP PKK Barito Utara Hj.Sri Hidayati Nadalsyah

tersebut juga meminta pelajar dan generasi muda Barito Utara agar bijaksana dan cerdas dalam menggunakan teknologi informasi sehingga pemanfaatan media khususnya media sosial betul-betul untuk kebutuhan yang positif guna menunjang pendidikan dalam rangka meraih prestasi di dunia pendidikan.\*\*\*





